

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan polusi udara terjadi di DKI Jakarta karena pemerintah tidak mampu memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan dua teori yang diaplikasikan sebagai pisau analisis untuk memahami dan menelaah pertanyaan penelitian, yaitu Strategi Kampanye dari Teori Coalition Building and Advocacy Networks oleh Keck & Sikkink (1998) dan Teori Advocacy and Lobbying Strategies oleh Baumgartner, F. R., dkk., (2009). Greenpeace Indonesia dan WALHI memiliki peran penting untuk mendorong pemerintah guna mengambil langkah-langkah tegas dan efektif untuk mendesak pemerintah mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan, Greenpeace Indonesia dan WALHI memiliki perhatian yang sama terhadap isu polusi udara di DKI Jakarta. Perbedaan strategi diantara keduanya membuat kampanye yang dilakukan oleh kedua organisasi ini saling melengkapi. Greenpeace Indonesia yang berbasis internasional memiliki kampanye digital yang efektif, sedangkan WALHI melakukan kampanye konvensional dengan baik karena basisnya organisasi lokal dan memiliki jaringan akar rumput yang kuat antar komunitas lokalnya.

Strategi yang dilakukan oleh NGO Greenpeace Indonesia dan WALHI diantaranya menggunakan media sosial dan media-media besar berskala internasional. Kedua organisasi ini juga membentuk sebuah koalisi yang bernama Koalisi Ibukota, guna memperbesar kolaborasi dan memperluas mobilisasi kolektifnya. Koalisi Ibukota telah memenangkan gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* mengenai Hak Udara Bersih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021.

Di tahun 2023, Greenpeace dan WALHI bersama dengan Koalisi Ibukota fokus melakukan advokasi beserta kampanye sosial untuk mendesak dan menagih janji pemerintah untuk menjalankan putusan pengadilan di tahun 2021 lalu. Serta memenuhi hak warga negara untuk memiliki lingkungan hidup yang bersih dan

sehat, utamanya udara yang tidak berpolutan dan membahayakan kesehatan dan berpotensi kematian

## **5.2 Saran**

Mengulas kembali strategi NGO Lingkungan Greenpeace Indonesia dan WALHI dalam mengampanyekan isu polusi udara yang berdasarkan koalisi dan momentum, sudah semestinya memiliki dasar kampanye yang baik dalam jangka yang panjang. Sebab apabila hanya berdasarkan momentum, masyarakat akan mudah lupa dan isu yang dibahas tidak lagi dianggap penting. Maka dari itu, diperlukan pola kampanye yang lebih terorganisir dan berjangka panjang. Selain itu, NGO harus melakukan aksi secara komprehensif dan menyeluruh terhadap aspek-aspek terkait.

Berhubung NGO sudah melakukan berbagai macam upaya kampanye bahkan sampai divalidasi oleh pengadilan melalui jalur hukum, sudah sebaiknya pemerintah mendengarkan komplain warga negara dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal udara bersih. Seharusnya, pemerintah membuat kebijakan dengan mempertimbangkan dampak-dampak jangka panjang yang dilakukan. Bukan hanya memprioritaskan laba untung-rugi dari pembangunan yang terjadi. Pemerintah sebaiknya berpihak kepada masyarakat yang sudah memenangkan gugatan berkali-kali. Misalnya seperti mengikuti strategi kontrol polusi yang ada di blueprint DKI Jakarta, mengajak NGO lingkungan dan ahli-ahli yang lebih paham untuk merumuskan kebijakan terkait dengan pengendalian pencemaran udara agar tidak salah sasaran.

Adapun dalam upaya meningkatkan kualitas udara yang dihirup setiap hari, peningkatan strategi pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting. Melalui pembaruan inventarisasi emisi yang berkelanjutan, pemantauan sistematis, dan evaluasi dampak kesehatan, sosial, serta ekonomi dari pencemaran udara, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif. Pembentukan kelompok kerja multi-sektoral juga menjadi langkah krusial untuk memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi masalah ini.

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang kuat harus diperkuat, sementara investasi dalam transportasi publik yang ramah lingkungan serta pengembangan zona rendah emisi menjadi penting untuk mengurangi emisi dari sumber mobile. Uji emisi kendaraan, peningkatan infrastruktur pendukung, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga harus diprioritaskan. Selanjutnya, melalui kampanye penyadaran dan program partisipatif, keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pengendalian pencemaran udara dapat berjalan sesuai tujuan dan mencapai udara yang lebih bersih dan lebih aman untuk generasi mendatang.